

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986)
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1997)
- Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti)
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999)
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Yogyakarta : Total Media, 2009)
- Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2010)

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, (Bandung : Alumni, 2005)
- Teguh dan Aria, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2011)
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung, Sinar Baru)
- Muladi, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- I.S. Susanto, Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995)
- Boy Mardjono Reksodiputro, dalam Sahetapy Et, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Cv. Rajawali, 1995)
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Koentjaningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta :Gramedia,1985)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981)

Purwoleksono, Didik Endro, Tindak Pidana Di Bidang Merek Dan Jenis Sanksinya, (Yuridika, 2005)

H. Parman Soeparman, Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, (Refika Aditama, Bandung, 2007)

H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2007)

R. Soepramono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung, Sinar Baru)

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009)

Jurnal

Yusuf, Raihan, Analisis Viktimologi Kritis Terhadap Pemberian Kompensas dan Restitusi Korban Terorisme di Indonesia, Tesis pada Universitas Indonesia, (2018)

- Ransun, Alvianto RV, Mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, (Januari – Maret 2012)
- Nugroho, Sigit Sapto, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Jurnal Sosial Volume 15 No. 1 (Maret 2014)
- Mareta, Josefhin, Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban, jurnal JIKH, Volume 10 No. 1, (Maret 2016)
- Iriyanto, Echwan, Pemberian Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya : 2005)
- G. Widiartama, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, Jurnal Justitiaet Pax Universitas Atma Jaya, Volume 33 No. 1, (2017)
- Djanggih, Hardianto, Konsep Keadilan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tonpotika Lawuk Banggai, (April 2018).
- Tito Eliandi, SH, artikel tentang praperadilan dalam hukum indonesia, di tulis tahun 2008
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pidana dalam Mengantisipasi Berlakunya Konsep KUHP Baru, Makalah disajikan dalam

Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan
Undip Semarang tanggal 12-31 Januari 1993.

Rianda Prima Putri, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam
Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Bukittinggi, Soumater Law
Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1,
Nomor 1, 2018

Sri Hartini, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, Model Perlindungan Hukum
Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten
Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 12 No. 3, September 2012

Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Antara
Desiderata dan Realita, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 1, Januari 2016

Kemmi Efrosien Leunufna, Tinjauan Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam
Proses Diversi Perkara Pidana Anak Dihubungkan Dengan Hukum Adat
“Larvul Ngabal” Yang Berlaku Pada Masyarakat Kei-Maluku Tenggara,
(Artikel Hukum Konsep Restorative Justice, Pengadilan Negeri Tual)

Umi Rozah, Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal, (MMH, Jilid
39 No.3 September 2010)

Gilang Ramadhan Suharto, Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia, (Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Kompensasi

Nota Kesepakatan Pedoman Kerja antara Kejaksaan Agung dan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban Nomor NK-005/1.D1V4.2/04/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Website

<https://lpsk.go.id/> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Laporan Tahunan 2016”. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22804/hakim-tolak-penggabungan-perkara/> , diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 13.26 WIB.

<https://uad.ac.id/id/saatnya-terapkan-restorative-justice/>, diakses pada 15 Februari

Pukul 22.00 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/109677-ID-pemberianganti-rugi-oleh-pelaku-kepada.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

<http://majelispennulis.blogspot.com/2013/06/konsep-dasar-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.